

ANALISIS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA KEBAKARAN PADA KAWASAN PEMUKIMAN PADAT PENDUDUK

(Studi Kasus Kelurahan Prawirodirjan Yogyakarta)

Meysia Dilla Arismawati, Oktomi Wijaya S.KM.,M.Sc Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta E-mail :

Meysiadilaa@gmail.com

INTISARI

Latar Belakang : Di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. Kep 186/MEN/1999 disebutkan bahwa pada tempat kerja diwajibkan melaksanakan upaya penanggulangan kebakaran yang mengandung risiko bahaya tinggi. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir korban dan kerusakan peralatan yang disebabkan oleh kebakaran yang berasal dari bahan kimia dan instalasi listrik. Kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun pada saat kondisi normal (pra bencana), saat terjadi bencana (penyelamatan), tanggap darurat dan siap siaga pasca bencana. Peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Metode: Penelitian ini menggunakan metode mix methods dengan rancangan studi kasus. Terdapat data kuantitatif meliputi pengetahuan tentang kebakaran dan data kualitatif meliputi perencanaan kedaruratan, mobilisasi sumber daya. Analisis data menggunakan metode deskriptif kuantitatif, metode triangulasi sumber dan triangulasi Teknik.

Hasil Penelitian: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesiapsiagaan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan tergolong dalam kategori belum siap. Hal ini ditandai dengan tidak adanya perencanaan kedaruratan, sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang belum lengkap, sumber daya manusia yang tidak terlatih dan tidak terdapat anggaran dana baik APBD/APBDes untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masyarakat.

Kesimpulan : Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan belum siap dalam menghadapi bencana kebakaran.

Kata Kunci : Kesiapsiagaan, Kebakaran, Prawirodirjan.

**ANALISIS KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI
BENCANA KEBAKARAN PADA KAWASAN PEMUKIMAN PADAT
PENDUDUK**

(Studi Kasus Kelurahan Prawirodirjan Yogyakarta)

Meysia Dilla Arismawati, Oktomi Wijaya S.KM.,M.Sc Fakultas Kesehatan
Masyarakat, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta E-mail :

Meysiadilaa@gmail.com

ABSTRACT

Background: In the Decree of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia No. Kep 186 / MEN / 1999 states that workplaces are required to carry out fire prevention efforts that contain a high risk of danger. This aims to minimize casualties and equipment damage caused by fires originating from chemicals and electrical installations. Community preparedness must be built during normal (pre-disaster) conditions, during a disaster (rescue), emergency response and post-disaster preparedness. The role of the community to participate in disaster management activities is regulated in Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management.

Method: This study used a mix method with a case study design. There are quantitative data including knowledge about fire and qualitative data including emergency planning, resource mobilization. Data analysis used descriptive quantitative method, source triangulation method and technique triangulation.

Research Results: Based on the results of the study showed that the level of community preparedness in the Village of Prawirodirjan was in the category of not ready. This is indicated by the absence of emergency planning, incomplete fire prevention infrastructure, unskilled human resources and lack of budget funds either from the Regional Budget / Regional Budget to increase preparedness in the community.

Conclusion: Prawirodirjan Urban Village Community is not yet fully prepared to deal with fire disasters.

Keywords: Preparedness, Fire, Prawirodirjan.

A. PENDAHULUAN

Kebakaran menjadi masalah bencana yang sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tahun 2018, di Indonesia telah terjadi kasus kebakaran pada tahun 2013 sebanyak 398 kasus, tahun 2014 sebanyak 471 kasus, tahun 2015 sebanyak 403 kasus. Penyebab dalam kejadian kasus kebakaran meliputi kebocoran gas, konsleting arus listrik dan diduga akibat dari pembakaran sampah.

Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, yakni pada tahun 2017 dan 2018 di Daerah Istimewa Yogyakarta telah terjadi bencana kebakaran di pemukiman sejumlah 135 kasus yang terjadi di dalam kota. Pada tahun 2017 terjadi kejadian kebakaran yaitu 71 kasus dan pada tahun 2018 terjadi 64 kasus kebakaran yang meliputi 14 kecamatan di kota Yogyakarta. Adapun kejadian kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik 73 kasus, kebocoran gas 14 kasus, pembakaran sampah 6 kasus, kebakaran tungku 2 kasus, putung rokok 4 kasus, cairan mudah terbakar 2 kasus, *human eror* 17 kasus dan faktor faktor lainnya 17 kasus¹

Kesiapsiagaan masyarakat harus dibangun pada saat kondisi normal (pra bencana), saat terjadi bencana (penyelamatan), tanggap darurat dan siap siaga pasca bencana. Peran masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007² Tentang Penanggulangan Bencana pasal 26 ayat 1 huruf e, yakni "Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana. Pasal 27 huruf b menjelaskan bahwa setiap orang berkewajiban melakukan kegiatan penanggulangan bencana.

Berdasarkan studi pendahuluan yang telah dilakukan peneliti di kelurahan Prawirodirjan, faktor kejadian kebakaran yaitu hubungan arus pendek listrik dan penggunaan gas LPG. Hasil observasi peneliti, risiko kebakaran pada kawasan padat penduduk diperparah oleh tidak adanya lokasi titik kumpul, tidak adanya rambu evakuasi, tidak adanya akses mobil pemadam kebakaran, jarak antar rumah yang berdekatan dengan kondisi fisik bangunan yang semi permanen. Terdapat sistem proteksi kebakaran di wilayah Kelurahan Prawirodirjan yaitu APAR dan hydrant namun dalam kondisi yang tidak terawat. Untuk mengurangi risiko kebakaran, maka diperlukan upaya peningkatan kesiapsiagaan. Pada wilayah Kelurahan Prawirodirjan belum pernah dilakukan penelitian mengenai aspek kesiapsiagaan bencana kebakaran pada daerah pemukiman. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisis kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran pada kawasan pemukiman padat penduduk (Studi Kasus Pada Kelurahan Prawirodirjan Yogyakarta).

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kombinasi dengan rancangan studi kasus. Penelitian kombinasi (*mix mentods*) merupakan suatu langkah penelitian dengan menggabungkan dua bentuk pendekatan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Penelitian campuran merupakan

pendekatan penelitian yang mengkombinasikan penelitian antara metode kuantitatif dengan kualitatif³

Lokasi penelitian dilaksanakan di pemukiman padat penduduk Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan daerah Istimewa Yogyakarta. Waktu penelitian dilaksanakan mulai Maret-Agustus 2019. Cara pengumpulan data yang dilakukan pada data kuantitatif variabel pengetahuan dilakukan dengan penyebaran kuesioner pada 107 responden. Data kuantitatif variabel perencanaan kedaruratan, dan mobilisasi sumberdaya didapatkan dari hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen.

C. HASIL PENELITIAN

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bencana Kebakaran

Pengetahuan dalam penelitian adalah pengetahuan yang dimiliki responden mengenai bencana kebakaran. Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dan analisis data, diperoleh sejumlah 107 responden, yang terbagi atas empat kampung. Data tingkat pengetahuan masyarakat diperoleh berdasarkan tanggapan responden dengan mengajukan 20 butir pertanyaan. Hasil jawaban dari kuesioner maka diolah dan didapatkan hasil *median*. Hasil tersebut akan digunakan dalam pengkategorian tinggi dan rendah. Data kategori tingkat pengetahuan masyarakat diperoleh dari nilai *median* = 15 dikarenakan data tidak berdistribusi normal. Adapun rumus pengkategorian yaitu : Kategori rendah = $X < Median$ dan Kategori tinggi = $X \geq Median$,

Dari hasil pengelolaan data didapatkan hasil distribusi tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan adalah :

Tabel 4.2. Distribusi Frekuensi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bencana Kebakaran

Tingkat Pengetahuan	Frekuensi	Presentase
Rendah	50	46.7%
Tinggi	57	53.3%

Sumber : Data primer peneliti.

Berdasarkan tabel 4.2 didapatkan hasil tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan mengenai bencana kebakaran tergolong dalam kategori tinggi dengan jumlah presentase (53.3%) yaitu sebanyak 57 orang.

Perencanaan Kedaruratan

Penilaian risiko bencana dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis bahaya (*hazard*) dan evakuasi kondisi kerentanan yang dapat berpotensi membahayakan orang lain yang ditimbulkan dari dampak bencana, yang dapat menimbulkan kerusakan, hilangnya harta benda, membahayakan kehidupan.

Penilaian Risiko Bencana

Penilaian risiko bencana dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis bahaya (*hazard*) dan evakuasi kondisi kerentanan yang dapat berpotensi membahayakan orang lain yang ditimbulkan dari dampak bencana, yang dapat menimbulkan kerusakan, hilangnya harta benda, membahayakan kehidupan.

Hasil wawancara disimpulkan bahwa pada Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki penilaian risiko bencana kebakaran, hal ini didukung oleh hasil telaah dokumen peneliti bawasannya di kantor kelurahan tidak ditemukan dokumen penilaian risiko bencana kebakaran, namun hanya tertera gambar peta risiko bencana banjir.

Pembuatan Skenario Mitigasi Bencana

Sebuah perencanaan skenario mitigasi dalam penelitian ini menjadi salah satu upaya pelaksanaan penanggulangan bencana, pembuatan skenario mitigasi bencana kebakaran memberikan gambaran yang akan terjadi di masa yang akan datang, sehingga suatu proses evakuasi dapat dilaksanakan secara tepat dan tepat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pada wilayah Kelurahan Prawirodirjan didapatkan hasil :

“Secara umum bentuk mitigasi untuk bencana sudah dibuat namun untuk kebakarannya belum, tetapi untuk bencana banjir sudah di peta kan karena sering terjadi, untuk simulasi dilakukan oleh BPBD Bersama warga (KTB)” (R1).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki skenario mitigasi bencana kebakaran, hal ini didukung oleh hasil telaah dokumen peneliti, tidak ditemukan dokumen skenario mitigasi bencana pada kantor Kelurahan Prawirodirjan.

Kebijakan

Kebijakan dalam penelitian ini adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah meliputi Kepala RT, Kepala RW ataupun Lurah Prawirodirjan yang berisikan aturan-aturan mengenai bencana, penanggulangan bencana, dan membangun kesiapsiagaan di masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pada wilayah Kelurahan Prawirodirjan didapatkan hasil :

“Kalau untuk kebijakan yaa, tidak ada aturan yang resmi, tetapi apabila terjadi bencana kebakaran warga akan melaporkan ke RW dan diteruskan ke kelurahan, dan juga menghubungi pihak pemadam untuk melakukan penanganan” (R2).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki kebijakan mengenai penanggulangan bencana kebakaran. Hal ini didukung oleh hasil telaah dokumen, saat penelitian tidak ditemukan dokumen kebijakan yang tertera di kantor kelurahan. Sekretaris kelurahan juga tidak memiliki arsip dokumen mengenai bencana kebijakan penanggulangan bencana kebakaran.

Perencanaan Sektoral

Rencana sektoral dalam penelitian ini berupa penyiapan kesiapsiagaan mengenai bencana kebakaran dengan melaksanakan kegiatan baik penyuluhan maupun pelatihan terkait bencana kebakaran. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pada wilayah Kelurahan Prawirodirjan didapatkan hasil :

“Bentuk bantuan itu langsung diberikan oleh dinas sosial, jadi dari pihak kelurahan tidak memiliki rencana sektoralnya, dari kelurahan biasanya membantu dalam melaporkan ke kantor kecamatan(R2).

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa, perencanaan sektoral untuk bencana kebakaran pada Kelurahan Prawirodirjan belum dibuat, baik dalam sector sarana prasarana maupun sector sosial. Pernyataan ini didukung oleh hasil observasi, peneliti tidak menemukan perbaikan jalur evakuasi, penyediaan tenda darurat pengungsian, dan stok sandang pangan untuk bantuan kepada masyarakat di kantor Kelurahan Prawirodirjan.

Mobilisasi Sumber Daya

Mobilisasi sumber daya dalam penelitian ini meliputi sumber daya manusia, sarana prasana dan pendanaan dalam penanggulangan bencana kebakaran di Kelurahan Prawirodirjan. Mobilisasi sumberdaya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan yang digunakan.

Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia didalam penelitian ini adalah sumber daya yang mampu melakukan kegiatan penanggulangan kejadian kebakaran secara cepat dan tepat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan pada wilayah Kelurahan Prawirodirjan didapatkan hasil :

“Ada organisasi sukarelawan dari masyarakat Namanya CODE X, tetapi tidak ada struktur secara resminya.” (R2)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pada Kelurahan Prawirodirjan sudah memiliki sumber daya manusia yang terdiri atas sukarelawan kebakaran (SATLAKAR) yang dinaungi oleh komunitas CODE-X Prawirodirjan. Hasil tersebut didukung oleh hasil wawancara triangulasi dengan Kepala Sie Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran yang menyebutkan bahwa disetiap kampung sudah dibentuk SATLAKAR (Sukarelawan Kebakaran), satlakar tersebut dibentuk atas sukarelawan masyarakat yang tergabung dalam program kampung tangguh bencana (KTB). Pada hasil telaah dokumen keanggotaan SATLAKAR Kelurahan Prawirodirjan ini belum memiliki struktur anggota dan tugas pokok wewenang disetiap anggotanya.

Sarana Prasarana

Sarana prasarana dalam penelitian ini adalah sarana prasarana yang membantu proses penanggulangan kebakaran meliputi fasilitas yang diberikan pemerintah daerah setempat, guna membantu masyarakat dalam melaksanakan penanggulangan kebakaran. Sarana prasarana tersebut dapat difasilitasi oleh kelurahan maupun dinas terkait. Adapun sarana prasarana yang diteliti yaitu

ketersediaan alat pemadam api ringan, hydrant, posko pemadam, rambu evakuasi, titik kumpul dan jalur evakuasi.

Hasil penelitian pada indikator mobilisasi sumber daya di Kelurahan Prawirodirjan didapatkan hasil, sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran sebagian besar tersedia, namun tidak terpasang sesuai ketentuan. Peneliti tidak memukan APAR yang diletakkan di rumah Kepala RW karena pada saat dilakukan penelitian APAR dilakukan perawatan dan diambil oleh pihak kecamatan.

Peralatan yang difasilitasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta guna membantu meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat terkait bencana kebakaran di tingkat Kelurahan. Apar menjadi pilihan umum ketika terjadi bencana kebakaran sehingga masyarakat dapat secara mandiri melakukan pemadaman. Masyarakat juga sudah terlatih menggunakan APAR karena sudah sering dilakukan pelatihan. Kemampuan penggunaan APAR ini tergolong efektif dalam meminimalisir risiko kebakaran sebelum kebakaran meluas. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang ada di Kelurahan Prawirodirjan hanya terdapat hydrant.

Pendanaan

Pendanaan dalam membangun kesiapsiagaan dalam penelitian ini adalah dana yang disiapkan dari APBD Kapupaten/Kota, APBDes/ADD maupun dana mandiri masyarakat dan sector swasta untuk mendorong upaya penanggulangan risiko bencana. Berdasarkan hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada dana Kelurahan/Desa yang dianggarkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masyarakat. Anggaran dana belum disiapkan karena Kelurahan Prawirodirjan belum diresmikan untuk menjadi Kampung Tangguh Bencana (KTB). Jika sudah diresmikan, maka akan dibuatkan SK sehingga kampung Tangguh bencana (KTB) diharapkan bias mengakses dana yang ada. Pernyataan tersebut didukung oleh hasil telaah dokumen peneliti bahwa tidak ditemukan catatan anggaran dana untuk meningkatkan kesiapsiagaan di masyarakat oleh bendahara kelurahan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pada Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki dana swadaya terkait penyiapan kesiapsiagaan di masyarakat. Namun terdapat dana bantuan yang diberikan oleh masyarakat sebagai bentuk sumbangan untuk masyarakat lain yang tertimpa bencana kebakaran.

D. PEMBAHASAN

Tingkat Pengetahuan Masyarakat Mengenai Bencana Kebakran Di Kelurahan Prawirodirjan

Tingkat pengetahuan dalam penelitian ini adalah seberapa jauh pengetahuan masyarakat dalam memahami aspek-aspek mengenai bencana kebakaran. Tingkat pengetahuan merupakan salah satu faktor yang memiliki peran dalam membangun kesiapsiagaan di masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di pemukiman padat penduduk Kelurahan Prawirodirjan menunjukkan bahwa responden yang mampu menjawab pertanyaan dengan benar sebesar 57 orang (53.3%), sedangkan presentase yang menjawab pertanyaan dengan tingkat kesalahan yang cukup tinggi sebesar 50 orang (46.7%).

Tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan tergolong tinggi dalam memahami aspek-aspek bencana kebakaran. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Umar⁴ di Kecamatan Kulawai Sigi Sulawesi tengah dengan hasil penelitian tingkat pengetahuan masyarakat Kulawi Sulawesi tengah tergolong rendah, hal ini dikarenakan masyarakat belum mengetahui jenis-jenis bencana, penyebab bencana serta penanggulangan bencana yang tepat. Masyarakat belum mengetahui kesiapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum terjadi bencana, saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana.

Pengetahuan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan dalam mencegah kebakaran sudah cukup memadai hal ini ditunjukkan dengan kebiasaan mencabut colokan listrik yang bertumpuk tumpuk, hal ini sejalan dengan penelitian Wulandari⁵ mengenai Kesiapsiagaan Pada kampung Pelangi Kota Semarang. Pengetahuan masyarakat tersebut mengenai cara mencegah kebakaran yaitu warga sudah melakukan upaya antisipasi dengan meningkatkan kewaspadaan, misalnya mencabut colokan listrik, tidak membakar sampah dilingkungan sekitar dan tidak meninggalkan kompor saat memasak.

Masyarakat Kelurahan Prawirodirjan sebagian besar sudah mengetahui aspek-aspek bencana kebakaran namun terdapat pertanyaan yang memiliki presentase jawaban salah cukup tinggi, yaitu pada pertanyaan mengenai ukuran standart tinggi APAR sebesar 52% kesalahan, letak APAR pada lingkungan perumahan 70% kesalahan dan cara mengevakuasi diri sebesar 63% kesalahan.

Perencanaan Kedaruratan

Penilaian Risiko Bencana Kebakaran

Penilaian risiko dalam penelitian ini adalah suatu penilaian untuk menentukan proses dan kejadian melalui analisis mengenai bahaya (*hazard*) dan evakuasi kondisi kerentanan yang dapat berpotensi membahayakan orang lain yang ditimbulkan dari dampak suatu bencana, yang dapat menimbulkan kerusakan. Berdasarkan hasil penelitian pada Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki penilaian risiko bencana kebakaran. Menurut keterangan Lurah Prawirodirjan dari kecamatan sudah dalam proses menyiapkan penilaian risiko untuk setiap bencana yang mungkin terjadi di Kelurahan Prawirodirjan.

Penilaian risiko digunakan untuk menunjukkan lokasi-lokasi yang rentan terhadap bencana kebakaran pada lingkungan pemukiman. Kerentanan tersebut diperparah dengan banyaknya jumlah penduduk dan bangunan yang semi permanen. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Firmansyah⁶ mengenai analisis risiko kebakaran di Kota Bukittinggi, yaitu pada wilayah Kota Bukittinggi memiliki tingkat kepadatan dan kerentanan kebakaran yang tinggi pula, namun sudah dibuat penilaian risiko bencana kebakaran sehingga kejadian kebakaran dapat dicegah dan diantisipasi terlebih dahulu. Semakin padat suatu daerah akan mempermudah api merambat cepat karena struktur bangunan yang padat dan berhimpitan. Pada penelitian ini penilaian risiko pada kawasan padat sering diabaikan sehingga apabila terjadi bencana kebakaran akan memperparah kondisi bencana.

Skenario Mitigasi Bencana

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki skenario mitigasi bencana kebakaran. Hasil telaah dokumen tidak ditemukan dokumen mengenai pemilihan dan penetapan simulasi bencana yang meliputi

kegiatan penentuan titik potensi bencana, dokumen sebaran tempat tinggal dan hunian warga sekitar, prasarana dan sarana yang tersedia dan pelaksanaan simulasi sudah ada namun tidak sesuai. Pada aspek identifikasi dan pemetaan sarana prasarana yang mendukung penanggulangan kebakaran hanya tersedia APAR dan Hydrant namun jumlah dan ketersediaan belum sesuai dengan standart.

Pada Kelurahan Prawirodirjan tidak ditemukan dokumen skenario mitigasi bencana kebakaran dan dari informasi perangkat desa terkait menyatakan bahwa memang dari Kelurahan tersebut tidak memiliki skenario mitigasi bencana baik bencana secara umum maupun spesifik ke bencana kebakaran. Sedangkan menurut Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana No: 04 Tahun 2008⁷ tentang pedoman penyusunan rencana penanggulangan bencana, dalam pembuatan skenario mitigasi bencana langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengenali jenis bencana atau ancaman bencana yang mengancam wilayah tersebut. Kemudian di dalam pembuatan skenario disusun langkah langkah kegiatan penanggulangan dan menerapkan paradigma penilaian risiko secara holistik. Maka dari itu disetiap wilayah yang memiliki potensi bencana harus mempunyai skenario mitigasi bencana untuk membantu dalam penyiapan kesiapsiagaan di masyarakat.

Pada Kelurahan Prawirodirjan tidak tersedia sarana prasarana yang memadai dalam proses penanggulangan bencana kebakaran, hal ini sejalan dengan penelitian hellu⁸ di Desa Tambakrejo Malang belum memiliki skenario mitigasi bencana dan sarana prasarana belum memenuhi aspek dalam penyiapan kesiapsiagaan, selain itu kesadaran dan partisipasi masyarakat masih kurang dalam turut berperan aktif dalam kegiatan pelatihan simulasi. Skenario mitigasi bencana terdapat gabungan antara penyiapan infrastruktur dengan SDM yang memadai.

Kebijakan

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki kebijakan yang mengatur tentang bencana kebakaran. Selain itu tidak ada bentuk komunikasi dari pihak lurah maupun camat setempat mengenai kebijakan bencana kebakaran. Berdasarkan hasil telaah dokumen di Kantor Kelurahan Prawirodirjan tidak ditemukan dokumen mengenai kebijakan bencana kebakaran. Sedangkan menurut aturan BNPB (2011)⁹ dalam rangka pengurangan risiko bencana harus dibuat adanya kebijakan yang menganduk aspek meliputi mengerahkan sumberdaya yang ada untuk dapat dipergunakan dalam penanggulangan bencana, mengkoordinasikan kegiatan penanganan bencana yang dilakukan berbagai lembaga baik pemerintah, swasta dan relawan, memastikan semua korban dapat segera ditolong dan terdapat lokasi untuk pengungsian, memantau dan melaporkan kerugian yang ditimbulkan bencana baik kerugian harta maupun korban jiwa, memastikan bantuan sampai kedaerah pengungsian dengan mengerahkan seluruh armada angkutan.

Kebijakan pada wilayah Kelurahan Prawirodirjan belum dibuat oleh pemerintah desa setempat, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Tatas¹⁰ tentang Rencana Kontijensi di Desa Kalikuning, Pacitan, Jawa Timur, dimana kebijakan pada desa Kalikuning sudah dibuat secara rinci terhadap salah satu potensi bencana, selain itu kebijakan yang telah dibuat secara rutin disosialisasikan kepada masyarakat guna meningkatkan pengetahuan dan masyarakat mampu berperan aktif dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat tersebut. Kebijakan yang

dijalankan oleh pemerinah setempat dimaksudkan untuk memberikan contoh atau pedoman bagi *stakeholders*, masyarakat maupun sector lainya untuk melaksanakan kegiatan tanggap darurat terhadap suatu potensi bencana.

Dampak apabila tidak adanya kebijakan yang mengatur mengenai bencana kebararan maka, masyarakat tidak akan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah setempat, hal ini dikarenakan Kepala Lurah atau Camat merupakan *role model* dalam menjalankan aturan atau kebijakan.

Perencanaan sektoral

Berdasarkan hasil penelitian pada Kelurahan Prawirodirjan pada perencanaan sektoral pada aspek sektor sarana prasarana sebagian besar sudah tersedia lokasi yang akan disiapkan untuk menjadi tempat pengungsian dan sarana prasarana penanggulangan bencana kebakaran, namun belum sesuai dengan kapasitas warga yang cukup banyak dimungkinkan area-area yang sudah disiapkan tidak cukup menampung keseluruhan warga. Sedangkan untuk sektor sosial untuk kebutuhan sandang, pangan, genset serta personil penyelamat sudah menjadi kewenangan sendiri oleh dinas terkait. Seperti halnya kebutuhan sandang dan pangan akan diberikan langsung oleh Dinas Sosial sementara untuk personil penyelamatan terdapat sukarelawan dari masyarakat serta bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran.

Kelurahan Prawirodirjan tidak memiliki stok tenda darurat, genset dan keperluan sandang pangan, sehingga apabila terjadi bencana masyarakat secara sukarela memberikan tumpangan serta bantuan kepada korban bencana kebakaran. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Hella di Desa Tambakrejo Malang, tidak ditemukan perencanaan sektoral mengenai bencana, sehingga apabila terjadi bencana hanya mengandalkan bantuan dari Dinas Sosial maupun warga sekitar. Masyarakat secara sukarela memberikan tumpangan dan mencari bantuan serta meminta sumbangan untuk membantu korban bencana.

Perencanaan sektoral pada Kelurahan Prawirodirjan sebagian besar belum disiapkan secara penuh, hal ini tentunya akan menimbulkan dampak terhadap proses penanggulangan bencana dan kesiapsiagaan akan berjalan kurang maksimal. Di dalam sektor sarana prasarana di wilayah Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki sarana prasarana untuk area pengungsian yang cukup, sehingga apabila terjadi bencana kebakaran area tersebut tidak cukup untuk menampung warga yang mengungsi. Selain itu tidak tersedianya tenda dan perbaikan jalur evakuasi akan memberlambat proses evakuasi dan memperparah timbulnya korban jiwa.

Mobilisasi Sumberdaya

Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil penelitian pada variabel sumber daya manusia di Kelurahan Prawirodirjan sudah memiliki SATLAKAR dan organisasi CODE-X namun belum memiliki tugas dan tanggung jawab, struktur, serta sertifikat pelatihan. Pelatihan dan sosialisasi dilakukan langsung oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan tidak memberikan sertifikat. Pada Kelurahan Prawirodirjan diadakannya program Kampung Tangguh Bencana (KTB) dan terdapat organisasi CODE-X, maka masyarakat menjadi pelaku utama dalam penyiapan kesiapsiagaan. Sumber daya manusia yang mumpuni dalam melakukan tindakan penanggulangan bencana

kebakaran tersedia dua orang disetiap kampungnya, sehingga pada satu Kelurahan hanya tersedia delapan orang yang harus memantau di seluruh wilayah kampung Prawirodirjan.

Penanggulangan bencana kebakaran di Kelurahan Prawirodirjan telah melibatkan masyarakat, organisasi masyarakat, pemuda pemudi desa, dan pemerintah. Sumber daya manusia yang kompeten akan membantu meningkatkan keterampilan dan dapat melakukan penanggulangan bencana yang sesuai dengan ketentuan, hal ini sesuai dengan penelitian Nurwulandari¹¹ pada pemukiman padat Kelurahan Tamansari, Kota Bandung didapatkan hasil bahwa masyarakat Kelurahan Tamansari memiliki keahlian dalam pencegahan kebakaran baik yang terlatih secara formal melalui program SATWAKNKAR, maupun keahlian pencegahan kebakaran pada kasus-kasus yang sebelumnya terjadi. Pelatihan tersebut diselenggarakan atas usulan warga dan dilatih oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bandung.

Sarana Prasarana

1) Alat Pemadam Api Ringan

Alat pemadam api ringan didalam lingkungan perumahan setidaknya harus tersedia pada setiap titik lokasi dan terdapat orang yang dapat menggunakannya. Berdasarkan hasil penelitian tidak ditemukan APAR di lingkungan pemukiman Kelurahan Prawirodirjan. Hasil wawancara dengan Lurah setempat menyebutkan bahwa APAR sedang dilakukan perawatan rutin sehingga tidak ada di lokasi penelitian. Namun hasil telaah dokumen di kantor Kelurahan Prawirodirjan peneliti juga tidak terdapat dokumen pemeliharaan serta catatan ketersediaan Apar di setiap RW nya.

Ketersediaan APAR pada setiap titik lingkungan pemukiman dapat membantu dalam memadamkan api skala kecil sebelum menjadi api yang lebih besar, namun pada lokasi penelitian ini tidak tersedia APAR baik di pemukiman maupun dikantor kecamatan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Karimah¹² pada Kota Semarang alat pendam api ringan (APAR) diletakkan disetiap titik-titik yang mudah dijangkau dan diingat oleh warga, seperti didalam masjid, balai desa, dan ruang pertemuan lainnya. Setiap kampung disediakan lebih dari empat APAR yang dipasang sesuai dengan ketentuan. Pemerintah Kota Semarang mengharapkan dengan tersedianya APA di lingkungan pemukiman, maka apabila terjadi kebakaran masyarakat dapat langsung menangani api skala kecil sebelum api menjadi lebih besar sehingga kerugian dapat diminimalisir.

2) Hydrant

Hydrant pada lingkungan Kelurahan Prawirodirjan sudah tersedia, hydrant tersebut dipasang dengan ketentuan berwarna merah, memiliki tekanan 35 bar, terdapat kotak hydrant dan selang sepanjang 45meter sehingga dipasang sambungan dari dinas kebakaran (*Siamese Connection*) untuk pengisian air ke dalam jaringan sistem hydrant dari dinas pemadam. Namun standart untuk pasokan air yaitu tidak kurang 24 liter/menit belum memenuhi, dikarenakan kondisi lingkungan yang padat akan rumah rumah penduduk, sumber air hanya menggunakan sumber sumur warga untuk pasokan hydrant. Hydrant juga sudah berwarna merah sesuai dengan standart dan terdapat selang yang memadai. Hasil observasi ini tidak sesuai dengan standar *SNI 03-1735-2000*¹³ tentang pemasangan hydrant di pemukiman harus

memenuhi syarat antara lain tiap bagian dari jalur akses mobil pemadam di lahan bangunan harus jalan dengan bebas hambatan sejauh 50m, dan dapat diakses oleh mobil pemadam. Pasokan air untuk hydrant harus sekurangnya 2400 liter/menit pada tekanan 3.5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 45 menit. Hasil penelitian yang telah dilakukan hydrant pada Kelurahan Prawirodirjan belum memenuhi standart yang telah ditetapkan.

Pemasangan Hydrant harus memenuhi beberapa faktor seperti meperhatikan kebutuhan di setiap wilayah selain itu harus mempertimbangkan aksestabilitas untuk mobil pemadam itu sendiri. Hasil dari penelirian ini sesuai dengan penelitian Haramain¹⁴ pada Kota Jakarta dimana sarana pemadam seperti hydrant belum terpasang di setiap titik per rukun warga. Tidak ada pemeliharaan hydrant secara berkala sehingga banyak ditemukan hydrant yang telah rusak, maka disarankan untuk memperbaharui ketersediaan hydrant karena wilayah Kota Jakarta yang padat berisiko tinggi akan terjadinya kebakaran.

3) Rambu Evakuasi

Dalam penelitian ini, dilingkungan Kelurahan Prawirodirjan belum memiliki rambu evakuasi yang memadai di setiap kampungnya, pada saat dilakukan observasi tidak ada rambu evakuasi yang terpasang, hanya didapatkan sedekar rambu hati hati dan rambu yang menunjukkan gang buntu. Hasil penelitian ini tidak sesuai syarat rambu evakuasi menurut *Standart SNI 03-1735-2000* yaitu diposisikan pada lokasi yang mudah terlihat dengan jelas, tidak tertutup dan tersembunyi, terlihat dalam jarak pandang maksimal 20m, rambu evakuasi mendapatkan penerangan yang cukup, dipastikan tanda keselamatan petunjuk jalur evakuasi sehingga rute keluar menuju titik kumpul terlihat jelas. Pada rambu evakuasi harus memperhatikan ukuran urut dan jarak baca aman minimum seperti pada jarak 3 m ukuran huruf sebesar 39 point.

4) Jalur Evakuasi

Dalam penelitian ini, pada wilayah Kelurahan Prawirodirjan memiliki jalur evakuasi yang kurang memadai. Jalur evakuasi yang tersedia banyak terhalang oleh kendaraan dan gerobak dagangan warga sekitar. Kondisi lingkungan yang sempit dan padat penduduk membuat masyarakat meletakkan barang barang keperluan rumah tangga di gang gang sekaligus digunakan untuk akses jalan. Pada jalur evakuasi lainnya sudah sesuai dengan kondisi jalan gang tidak licin, memiliki penerangan, dan tidak buntu. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Pratama¹⁵ di Lingkungan Kantor Keselamatan Pelabuhan Kelas II Balikpapan. Sarana penyelamatan jiwa yang meliputi jalur evakuasi sudah dibuat dengan menyediakan jalur yang cukup besar dengan lebar 1,5 meter, dan tertera peraturan untuk tidak menggunakan jalur tersebut untuk kepentingan warga sekitar. Jalur evakuasi pada wilayah pelabuhan dibuat dengan penerangan yang cukup dan terdapat rambu evakuasi yang mudah dilihat oleh masyarakat.

5) Titik Kumpul

Berdasarkan hasil penelitian wilayah Kelurahan Prawirodirjan memiliki tiga halaman yang dialokasikan menjadi titik kumpul ketika terjadi bencana kebakaran,

hasil observasi peneliti menemukan bahwa salah satu lokasi halaman balai RW 10 tidak sesuai karena lokasinya cukup sempit dan terletak di pinggir jalan. Lokasi titik kumpul yang digunakan juga tidak dapat manapun keseluruhan warga per kampung karena lokasi yang digunakan tidak sebanding dengan jumlah warga.

Pemilihan lokasi titik kumpul harus mempertimbangkan luas area dan jumlah penduduk, namun titik kumpul pada Kelurahan Prawirodirjan ini belum dapat menampung keseluruhan warga, hal ini tidak sesuai dengan persyaratan titik kumpul menurut *SNI 03-1735-2000* adalah tersedianya areal atau ruang yang cukup memadai, mudah diakses oleh korban bencana maupun penolong, cukup terlindung dari jangkauan bahaya secara langsung maupun tidak langsung, ketersediaan tempat naungan sementara, ketersediaan sarana komunikasi memadai yang terhubung dengan struktur organisasi kedaruratan, ketersediaan sarana pertolongan pertama dan peta jalur evakuasi.

Penentuan titik kumpul diberikan dengan asumsi dapat memfasilitasi masyarakat disekitar pemukiman tersebut. Jalur evakuasi dan titik kumpul memerlukan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatannya. Masyarakat setempat yang lebih mengetahui kondisi lingkungan dan situasi setempat serta kebutuhan akan wilayah tersebut.

Pendanaan

Pendanaan dalam penelitian ini adalah dana yang dimiliki Kelurahan Prawirodirjan yang berasal dari APBD, APDes, dana swadaya baik dari pemerintah maupun swasta yang digunakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat pada suatu wilayah. Berdasarkan hasil penelitian, tidak ada dana dari Kelurahan/Desa yang dianggarkan untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, baik dana tanggap darurat maupun dana untuk pengurangan risiko bencana. Anggaran tidak ada karena Kelurahan Prawirodirjan belum secara resmi menjadi Kampung Tangguh Bencana (KTB), sehingga apabila terjadi bencana kebakaran mendapatkan bantuan sukarela dari warga.

Berdasarkan hasil telaah dokumen juga tidak ditemukan anggaran desa ataupun rekapan bendahara desa terkait kebencanaan. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan aturan Perka BNPB No. 1 Tahun 2012, komponen desa Tangguh bencana salah satunya pendanaan. Tetapi hal ini belum sesuai karena tidak ada dana yang dialokasikan untuk mencegah terjadinya bencana. Dana selain dibutuhkan ketika bencana, juga diperlukan dalam membangun infrastruktur desa yang rusak.

Dampak apabila dari pemerintah daerah setempat tidak memiliki anggaran yang dikhususkan untuk menyiapkan kesiapsiagaan masyarakat maka kapasitas warga menjadi menurun karena jarang dilakukan pelatihan serta proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana tidak dapat berjalan secara cepat.

E. Kesimpulan dan Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesiapsiagaan Kelurahan Prawirodirjan termasuk dalam kategori belum siap, dalam penanggulangan bencana kebakaran. Hal ini ditandai dengan tidak adanya perencanaan kedaruratan, tidak adanya pelatihan untuk SATLAKAR, sarana prasarana penanggulangan kebakaran yang belum lengkap dan tidak ada anggaran dana.

2. Tingkat pengetahuan masyarakat Kelurahan Prawirodirjan, lebih dari setengah memiliki pengetahuan yang tinggi dalam manajemen penanggulangan kebakaran.
3. Perencanaan kedaruratan kebakaran pada Kelurahan Prawirodirjan, tergolong dalam kategori belum siap. Hal ini ditandai dengan tidak adanya penilaian risiko bencana kebakaran, skenario mitigasi bencana kebakaran, kebijakan dan perencanaan sektoral.
4. Mobilisasi sumber daya penanggulangan kebakaran pada Kelurahan Prawirodirjan, tergolong dalam kategori belum siap. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pelatihan kepada anggota SATLAKAR, sarana prasarana penanggulangan kebakaran belum lengkap dan tidak ada anggaran dana.

Dari hasil penelitian dan pembahasan di dapatkan saran sebagai berikut :

1. Bagi Kelurahan Prawirodirjan

- a. Disarankan kepada pemerintah daerah Prawirodirjan, memberikan pelatihan dan sosialisasi mengenai penanggulangan bencana kebakaran yang ditekankan pada langkah evakuasi bencana kebakaran, lokasi peletakkan APAR dan tinggi pemasangan APAR.
- b. Pemerintah daerah Prawirodirjan berkerjasama dengan warga dalam pembuatan perencanaan kedaruratan kebakaran.
- c. Disarankan kepada pemerintah daerah Prawirodirjan, untuk mendampingi Satuan Relawan kebakaran dalam membentuk struktur organisasi dan pengadaan sertifikasi pelatihan.
- d. Disarankan kepada pemerintah daerah Prawirodirjan, untuk melengkapi sarana prasarana yang tersedia. Dimulai dengan menyediakan APAR sesuai dengan kebutuhan di masyarakat, serta melengkapi pemasangan hydrant di setiap RWnya. Pada jalur evakuasi disarankan untuk membebaskan jalur tersebut dari kendaraan serta gerobak-gerobak warga.
- e. Disarankan kepada pemerintah daerah Prawirodirjan, untuk menganggarkan dana baik APBDes ataupun swadaya masyarakat untuk peningkatan kesiapsiagaan di masyarakat.

F. DAFTAR PUSTAKA

1. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Yogyakarta. 2018. *Data Kejadian Kebakaran*. Yogyakarta.
2. Pemerintah Indonesia. 2007. *Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007: Tentang Penanggulangan Bencana*. Sekretariat Negara. Jakarta.
3. Creswell, J. W. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
4. Umar, Nurlailah. 2013. *Pengetahuan dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana Banjir di Bolapapu Kecamatan Kolawi Sigi Sulawesi Tengah*. *Jurnal Poltekes Kemenkes Palu*.
5. Wulandari, V., Suroto., Kurnaiwan, B. 2018. *Mitigasi Non Struktural Bencana Kebakaran Berbasis Kawasan Wisata dan Pemukiman Padat Penduduk (Studi Kasus Di Kampung Pelangi Kota Semarang)*. Universitas Diponegoro Semarang.
6. Firmansyah. 2016. *Analisis Risiko Bencana Kebakaran Di Kota Bukitinggi*. *Journal Fakultas Teknik*. Universitas Pasundan. Bukitinggi.

7. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana No: 04 Tahun 2008 tentang *Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana*. Jakarta
8. Hella, Kusumasari. 2016. Analisis Kesiapsiagaan Masyarakat di Desa Tambakrejo Malang. Universitas Negeri Malang.
9. Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2011. *Panduan Rencana Kontijensi*. Jakarta
10. Tatas., Wiguna, PA., Machsus. 2015. *Rencana Kontijensi Untuk Tanah longsor di Desa Kalikuning* , Pacitan, Jawa Timur.
11. Nurwulandari, F. 2016. *Kajian Mitigasi Bencana Kebakaran di Pemukiman Padat (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari)*. Jurnal Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Universitas Pasundan. Bandung.
12. Karimah, M., Kurniawan, B., Suroto. 2016. *Analisis Upaya Penanggulangan Kebakaran Di Gedung Bougenvile di Rumah Sakit Telogorejo*. Semarang.
13. Badan Standart Nasional Indonesia. 2000. *SNI 0-1735-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan Untuk Pencegahan Kebakaran*. Jakarta.
14. Haramain, A, M., Effendi, R., Irianto, F. 2017. *Perancangan Sistem Pemadam Kebakaran Pada Pemukiman Kota Jakarta*. Jurnal Program Studi Teknik Mesin, Universitas Muhammadiyah Jakarta.
15. Pratama, Agus. 2016. *Perancangan Sarana dan Kebutuhan APAR Pada Darurat Kebakaran di Kantor Keselamatan PelabuhanKelas II Balikpapan*. Jurnal Kantor Keselamatan Pelabuhan (KKP) Balikpapan . Kalimantan Selatan.